



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN



2021

**RENCANA KERJA
(RENJA)
PERANGKAT DAERAH**



Jl. Veteran No. 1 Padang Baris, Lubuk Basung, Telp/Fax : (0752) 85354, Kode Pos 26415
website: www.dpmptpnkterragamkab.go.id, e-mail : dpmptpnkterragam@gmail.com, no senter : 08196486096

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Di dalamnya juga mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala OPD untuk menyusun Renja OPD. Juga keterkaitan erat antara penyusunan RKPD dan Renja OPD.

Sebagai petunjuk pelaksanaannya, diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah atau Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat. Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 yang berfungsi menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD ke dalam program dan kegiatan OPD serta di dalamnya memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, dalam 1 (satu) tahun, sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD Kabupaten Agam dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2016-2021.

Dengan memperhatikan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021 serta Prioritas Pembangunan Tahun 2016-2021, maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam memprioritaskan :

1. Peningkatan realisasi nilai investasi.
2. Peningkatan kualitas layanan perizinan secara tepat dan transparan.
3. Peningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam Tahun 2021 yang berpedoman pada rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten tahun 2021, akan ditindak lanjuti dengan proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2021.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1447 Tahun 2019);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Agam tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2005 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Prubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2017 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Agam Nomor 56 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 56);
16. Peraturan Bupati Agam Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2020 Nomor 40).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud :

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Tahun 2021 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Tahun 2021 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam Tahun 2021.

1.3.2. Tujuan :

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Tahun 2021 ini adalah:

1. Sebagai dokumen yang secara substansial menjabarkan Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis

SKPD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);

2. Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA-PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2021;
3. Sebagai salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan ini disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2019

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019 dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

- 4.1. Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019 dan Capaian Renstra

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerjadan perkiraan capaian Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam Tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.1

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dpmpstsp Naker Kabupaten Agam s/d tahun 2020

OPD : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2019			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Restra Perangkat Daerah s/d tahun 2020	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10-4)
	Urusan :									
	Bidang Urusan : Urusan Wajib Non Pelayanan									
I	Program : Administrasi Perkantoran	Tertibnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran guna Mendukung Pelayanan Prima	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan :									
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Telpn, Internet, Air dan Listrik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	12 bulan	100%	100%
	3 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat - Rapat dan Konsultasi	100%	100%	100%	100%	100%	12 bulan	100%	100%
	4 Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	12 bulan	100%	100%
	5 Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Tersedianya Jasa dan Bahan Penunjang Operasional Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	12 bulan	100%	100%
	6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya Saranan dan Prasarana Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-
II	Program : Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Perusaha/ Perorangan yang menanamkan modalnya diatas Rp. 500,- juta	100					-	-	-

	1	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Terlaksananya a Verifikasi Data Tenaga Kerja dan Tersedianya informasi bursa kerja	2750 Org	4738 Org	2750 org	2374 Org		-	-	-
			Pelaksanaan Job fair, verifikasi data penganggur, tersedianya laporan dan informasi kerja	-	-	-	-		1 kali, 424 org, 12 laporan	12 laporan	-
	2	Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Praseleksi dan Pembekalan Pemagangan ke Jepang	80 Org		80 org	200 Org		160 orang dan 25 orang	-	-
VI		Program : Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	100%					,-		
		Kegiatan :									
	1	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Terlaksananya a Pembinaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.	35 Kasus	22 Kasus	35 kasus	46 kasus	131%	76 orang dan 40 kasus	23 Kasus	
	2	Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai	Calon Pencari Kerja yang dilatih	144 Org	32 Orang	144 orang	768 Orang (APBD dan APBN)		32 orang	32 orang	100%
	3	Padat karya infrastruktur, teknologi tepat guna dan tenaga kerja mandiri	Terserapnya Tenaga Kerja Pengangguran dan 1/2 Pengangguran	216 Org	-	216 Orang	-		216 orang	-	-

Sebagaimana ditetapkan dalam APBD Kabupaten Agam Tahun 2018 dan DPA Tahun 2018 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam telah dialokasikan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 2.315.675.850,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 2.294.458.949,- atau 99,08%, dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%.

Sedangkan Anggaran belanja langsung Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.239.11.094,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 2.178.840.020,- atau 97,31%, dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%. Dengan demikian, target indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2018 dan tahun 2019 dapat dicapai semuanya.

Indikator kinerja DPMPSTSP NAKER Kab. Agam pada Renstra Tahun 2016-2021 berjumlah 10 indikator. Realisasi capaian dari 10 indikator tersebut sampai dengan tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 2.2
 Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Renstra Dpmpstsp Naker Kab. Agam
 Tahun 2019

No	Indikator	Target Tahun 2019	Capaian Tahun 2019	Rencana Target 2020
1.	Jumlah realisasi investasi PMDN/PMA	500 M	191%	550 M
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 %	86 %	86 %
3.	Persentase penyelesaian perizinan tepat waktu	82 %	100 %	83 %
4.	Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
5.	Persentase pengangguran terbuka	5,23%	4,72 %	5 %
6.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	60 %	69,47 %	65 %
7.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	100 %	75 %	100 %
8.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi program BPJS Ketenagakerjaan	62 %	92 %	66 %
9.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	55 %	55 %	65 %
10.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	45%	45%	50%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Bupati Agam Nomor 56 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kab.Agam, maka

fungsi yang harus dilaksanakan adalah melakukan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan bidang Ketenagakerjaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut maka penjabaran antara Indikator Sasaran dengan Target dan Realisasi Capaian dalam Renstra DPMPTSP NAKER Kab Agam Tahun 2018 dan 2019 sebagaimana Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP NAKER
Kabupaten Agam

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK / IKU	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	Jumlah realisasi investor PMDN/PMA			500 M	550 M	977,9 M	24 M	Capaian dibawah target karena
2	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan			60%	65%	69%	45,8%	Rendahnya serapan tenaga kerja karena adanya pembatasan sosial akibat Covid-19
3	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Program BPJS Ketenagakerjaan			62%	66%	63%	94,7%	Meningkatnya tingkat kepatuhan pekerja untuk mengikuti Program BPJS
4	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi			55%	65%	69,47	24,6%	Jumlah paket pelatihan lebih sedikit karena terbatasnya anggaran
5	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan			45%	50%	50%	50%	Jumlah Pendaftar dan peserta pelatihan dibatasi ksesuai aturan penggunaan anggaran BLK Padang

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai target diantaranya:

1. Membangun komitmen untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dalam membangun secara kontinyu sistem pelayanan yang berstandar.

2. Melaksanakan pelayanan yang berbasis IT atau yang bersifat online sehingga memungkinkan proses pelayanan akan lebih cepat, efisien, dan informasinya menjadi transparan (WA, email).
3. Optimalisasi pelayanan dengan penggunaan aplikasi seperti SICANTIK, OSS.
4. Memfasilitasi penyelesaian hubungan industrial

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.3.1. Tingkat Pelayanan DPMPTSP NAKER Kab Agam

Dalam menyelenggarakan tugas pokok yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan ketenagakerjaan, DPMPTSP NAKER Kab Agam mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan bidang ketenagakerjaan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan bidang ketenagakerjaan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal dan bidang ketenagakerjaan.
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka kinerja pelayanan pada DPMPTSP NAKER Kab Agam lebih difokuskan pada :

- a. Realisasi investasi PMDN/PMA.
- b. Kualitas pelayanan perizinan.
- c. Penyerapan tenaga kerjayang terdaftar.
- d. Perlindungan Tenaga Kerja.
- e. Peningkatan Produktivitas tenaga kerja

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan berdasarkan Tugas dan Fungsi DPMPTSP NAKER Kab Agam.

Permasalahan dan hambatan DPMPTSP NAKER Kab Agam dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain:

1. Urusan Penanaman Modal
 - a. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
 - b. Belum optimalnya sinergitas, integrasi, dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan;
 - c. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan yang didukung oleh e-service;

- d. Terhambatnya investasi karena tersedianya lahan untuk industri yang terkendala oleh Tata Ruang dan keterbatasan infrastruktur pendukung;
- e. Belum optimalnya pelaporan investasi berbasis LKPM;

2. Urusan Tenaga Kerja

- a. Keterampilan SDM yang ada tidak sesuai dengan lowongan kerja yang dibutuhkan.
- b. Penyerapan tenaga kerja belum sebanding dengan jumlah tenaga kerja.
- c. Terbatasnya jumlah lowongan pekerjaan.
- d. Belum optimalnya laporan penempatan tenaga kerja dari perusahaan.
- e. Belum optimalnya Pencari kerja melaporkan diri setelah mendapatkan pekerjaan.
- f. Pertambahan jumlah tenaga kerja tidak sejalan dengan pertambahan lowongan kerja.
- g. Pemberian upah yang belum sesuai dengan Upah Minimum Provinsi.

2.3.3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Bupati dan terhadap capaian nasional.

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Agam Tahun 2016-2021, ditetapkan Visi Kabupaten Agam yaitu "Terwujudnya Kabupaten Agam yang Berkeadilan, Inovatif, Sejahtera, Agamis dan Beradab Menuju Agam Mandiri, Berprestasi Yang Madani".

Dalam rangka pencapaian Visi secara efektif dan efisien disusunlah Misi Bupati yaitu:

1. Meningkatkan Kehidupan Beragama dan Norma Adat Berlandaskan Prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih (*good and clean governance*) dan profesional.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat beriman dan berkeadilan.
4. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat yang kreatif dan inovatif.
6. Pembangunan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, tata ruang, mitigasi bencana dan menjadikan Agam sebagai destinasi pariwisata unggulan.
7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial.

Keterkaitan urusan Penanaman Modal dengan Misi Bupati adalah pada Misi Ke-2 : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan Misi Ke-4 :

Meningkatnya daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan. Sedangkan Misi pembangunan Kab. Agam yang terkait dengan urusan tenaga kerja yaitu Misi Ke-5 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat yang kreatif dan inovatif .

2.3.4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan DPMPTSP NAKER Kab Agam.

Tantangan DPMPTSP NAKER Kab Agam dalam rangka meningkatkan pelayanan sebagai berikut :

1. Urusan Penanaman Modal
 - a. Semakin meningkatnya peran nilai investasi dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi Kab. Agam;
 - b. Semakin tingginya harapan terhadap investor dalam memecahkan permasalahan pengangguran;
 - c. Semakin tingginya harapan masyarakat atas kualitas pelayanan publik;
 - d. Semakin tingginya tuntutan penerapan teknologi informasi.
2. Urusan Tenaga Kerja
 - a. Perkembangan teknologi sehingga terjadi efisiensi SDM yaitu mengganti tenaga manusia dengan mesin.
 - b. Pasar kerja membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang lebih baik.

Peluang DPMPTSP NAKER Kab Agam dalam rangka meningkatkan pelayanan sebagai berikut:

1. Urusan Penanaman Modal
 - a. Iklim usaha yang kondusif di Kab. Agam memberikan peluang pada masuknya investasi;
 - b. Posisi geografis yang strategis dan terbangunnya infrastruktur transportasi di Kabupaten Agam yang semakin baik;
 - c. Dukungan komitmen peningkatan pelayanan dari pimpinan daerah.
 - d. Struktur kelembagaan yang lebih kondusif dan akomodatif terhadap perkembangan perizinan.
2. Urusan Tenaga Kerja
 - a. Penguatan lembaga-lembaga pelatihan kompetensi/lifeskill
 - b. Peningkatan pelatihan atau keterampilan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dunia industri.
 - c. Peningkatan serapan tenaga kerja melalui pertumbuhan dan perkembangan UKM.

2.3.5. Rekomendasi strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2021.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP NAKER Kab Agam terdapat isu-isu penting yaitu :

1. Melambatnya pertumbuhan investasi.
2. Belum optimalnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap legalitas usaha yang dimiliki.
3. Lapangan kerja terbatas.
4. Kualitas tenaga kerja relatif rendah.
5. Peningkatan perselisihan hubungan industrial.

Langkah strategis yang akan dilaksanakan DPMPTSP NAKER Kab Agam guna mengatasi isu-isu penting tersebut di atas adalah:

1. Peningkatan kualitas kajian potensi penanaman modal
2. Peningkatan promosi penanaman modal yang inovatif
3. Peningkatan pelayanan perizinan
4. Peningkatan penyelesaian pengaduan masyarakat
5. Peningkatan tenaga kerja yang terampil, produktif, berkompeten dan tersertifikasi.
6. Optimalisasi Balai Latihan Kerja dengan meningkatkan Infrastruktur, sarana prasarana pelatihan dan kapasitas instruktur.
7. Peningkatan penyerapan tenaga kerja melalui penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja
8. Peningkatan Perlindungan dan kesejahteraan pekerja dan pengusaha

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dari hasil Forum SKPD yang telah dilaksanakan oleh Bappeda Kab. Agam, belum ada usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan pada Dpmptp Naker Kabupaten Agampada tabel Tabel 2.3.

Tabel 2.3

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Kabupaten Agam

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Nagari Sungai Puar Kec. Palembang	Jumlah Pencari Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi sub kejuruan servis sepeda motor	16 orang	

2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Kecamatan Canduang	Jumlah Pencari Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi sub kejuruan menjahit pakaian	16 orang	
---	--------------------------------------	--------------------	--	----------	--

BAB III

TUJUAN, SASARAN, DPMPSTP NAKER KAB AGAM

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Indonesia 2045 Berdaulat Adil Makmur,” Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Nasional diupayakan secara bertahap melalui RPJMN lima tahunan.

Tahun 2021 merupakan tahun kedua RPJMN Ke IV periode 2020-2024. Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Adapun Tema RPJMN IV (2020-2024) adalah: “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur, melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing.”

Tema RPJMN IV (2020 – 2024) dimaksud dapat disarikan dalam tiga kata kunci yaitu:

1. Struktur perekonomian yang kokoh;
2. Keunggulan kompetitif wilayah; dan
3. SDM Berkualitas.

Isu Strategis Bidang Ekonomi yang terpetakan, meliputi:

1. Transformasi belum berjalan, terdapat indikasi premature deindustrialization: kontribusi industri turun lebih cepat dibandingkan dengan negara tetangga sebelum mencapai sumbangan tertinggi.
2. Pertumbuhan ekonomi stagnan, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia 2000 – 2017 masih di kisaran 5,3%.
3. Defisit transaksi berjalan yang masih tinggi.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, salah satu Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Makro Tahun 2021 yaitu upaya pemulihan ekonomi akan diarahkan untuk menggerakkan kembali industri, pariwisata, dan investasi. Adapun strategi pemulihan ekonomi tahun 2021 akan mencakup:

Pembangunan SDM Strategi pembangunan SDM sangat erat kaitannya dengan upaya perluasan perlindungan sosial, penguatan sektor kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Pembangunan SDM perlu diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, antara lain melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pendidikan menengah dan tinggi umum. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kembali tingkat produktivitas tenaga kerja yang turun di masa COVID-19. Sementara itu, penguatan pembelajaran dalam kondisi darurat, termasuk melalui media daring, akan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.

Akselerasi Investasi Menarik investasi sebesar-besarnya untuk menggerakkan ekonomi melalui percepatan integrasi Online Single Submission (OSS), meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja, melakukan aftercare service untuk mempertahankan investasi yang ada agar tidak berpindah ke negara lain, serta perluasan posisi investasi.

Seiring dengan pemulihan kinerja perekonomian Indonesia, TPT diperkirakan dapat menurun, meskipun belum bisa kembali ke tingkat sebelumnya-menjadi pada kisaran 7,7-9,1 persen. Penciptaan kesempatan kerja baru ditargetkan mencapai 2,3-2,8 juta orang, tetapi hal tersebut akan sangat bergantung pada keberhasilan upaya pemulihan ekonomi, penumbuhan investasi padat pekerja, penguatan konsumsi, serta pengembangan UMKM. Penciptaan kesempatan kerja tersebut dibarengi dengan upaya strategis untuk meningkatkan keahlian tenaga kerja dan penguatan sistem perlindungan sosial bagi pekerja, terutama pekerja berpenghasilan rendah dan pekerja informal sebagai lesson learned pascapandemi

Sedangkan Prioritas Nasional khususnya prioritas ke-3 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya menunjukkan pencapaian kinerja yang cukup baik pada tahun 2019. Dari delapan indikator sasaran PN Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya, hanya satu indikator yang telah tercapai (realisasi >100 persen target), yaitu nilai devisa pariwisata sebesar Rp.278,60 triliun.

Arah kebijakan untuk mencapai Prioritas Nasional Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Kebijakan peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing tahun 2021 diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; penguatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui integrasi program bantuan sosial; peningkatan pelayanan kesehatan dan penguatan health service; peningkatan pemerataan layanan berkualitas; penyediaan dan pengembangan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual; peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda; perluasan akses dan ketahanan ekonomi penduduk miskin, rentan, dan terdampak COVID-19 terhadap aset produktif; serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, dengan mengutamakan perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi COVID-19.

Dalam rangka pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19, pembangunan ekonomi tahun 2021 diprioritaskan pada penguatan ketahanan ekonomi dengan titik berat pada pembukaan lapangan kerja padat karya, penguatan sistem pangan, pemulihan usaha koperasi dan UMKM, pemulihan industri dan perdagangan, pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta peningkatan

investasi. Sebagai langkah konkret, telah disusun tujuh MP untuk memperkuat ketahanan ekonomi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPSTP NAKER KAB. AGAM

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan pelaksanaan dari setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi Bupati Agam. Misi pembangunan Kab. Agam yang terkait dengan urusan penanaman modal yaitu Misi Ke-2 : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dengan sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi serta dengan indikator indeks reformasi birokrasi. Misi Ke-4 : Meningkatnya daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan dengan sasaran meningkatnya kinerja makro ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan masyarakat serta indikatornya persentase laju pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Misi pembangunan Kab. Agam yang terkait dengan urusan tenaga kerja yaitu Misi Ke-5: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat yang kreatif dan inovatif dengan sasaran menurunnya tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka dengan indikatornya persentase pengangguran terbuka.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kab. Agam tersebut telah ditetapkan tujuan dan sasaran urusan penanaman modal dan urusan ketenagakerjaan seperti diuraikan pada Tabel 3.1. berikut ini.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan tahun 2021.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya iklim investasi dan realisasi investasi	Meningkatnya nilai investasi	Jumlah realisasi Investasi PMDN/PMA	600 M
2	Meningkatnya operasional pelayanan perizinan	Meningkatnya kualitas Pelayanan perizinan dan Non Perizinan secara tepat dan transparan	Indeks Kepuasan Masyarakat	87
			Persentase penyelesaian perizinan tepat waktu	84%
			Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	100%

3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kerja	Meningkatnya kesempatan kerja dan perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,85%
			Besaran Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	75%
			Besaran Pencari kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	75%
			Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	63%
			Besaran pekerja/buruh yang terdaftar pada program bpjs ketenagakerjaan	68%

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPSTP NAKER
KABUPATEN AGAM TAHUN 2021

4.1. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mencapai sasaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kab. Agam yaitu meningkatnya realisasi investasi, meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan meningkatnya kesempatan kerja, telah ditetapkan indikator kinerja melalui pencapaian realisasi investasi, indeks kepuasan masyarakat, penyelesaian pelayanan perizinan yang tepat waktu, pencari kerja yang ditempatkan, fasilitasi hubungan industrial, peningkatan kompetensi pencari kerja.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Kegiatan pada program ini terdiri dari 1). Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran yang memuat anggaran untuk pengadaan alat tulis kantor dan barang habis pakai lainnya, biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, operasional pelayanan perizinan untuk 12 (dua belas) bulan. 2). Penunjang Operasional Jasa Perkantoran yang memuat anggaran untuk penyediaan pelayanan jasa kantor, pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan peralatan kantor, penyediaan telfon, internet, listrik dan air, pemeliharaan kendaraan dinas untuk 12 bulan. 3). Pengadaan sarana dan prasarana kantor yang memuat anggaran untuk rehab gedung kantor dan gedung BLK, pengadaan laptop, printer, komputer, scanner, kursi kendaraan dinas roda empat dan roda dua. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator persentase pemenuhan kebutuhan dasar Operasional unit kerja SKPD dengan target 100 %

b. Program Peningkatan kesempatan kerja.

Kegiatan pada program ini terdiri dari 1). Penyebarluasan informasi bursa kerja yang memuat anggaran untuk sosialisasi penempatan tenaga kerja, pendataan dan pembinaan bursa tenaga kerja khusus, pelaksanaan job fair, pemberdayaan tenaga kerja mandiri dan penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah. 2) Kerjasama pendidikan dan Pelatihan yang memuat anggaran untuk sosialisasi dan seleksi peserta magang ke jepang dan pembekalan peserta magang ke Jepang. 3) Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai yang memuat anggaran untuk pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan pemagangan peserta pelatihan berbasis kompetensi yang berprestasi di badan-badan usaha. 4) Padat Karya Infrastruktur Pedesaan yang memuat anggaran untuk pelaksanaan kegiatan infrastruktur yang bersifat padat karya untuk menyerap tenaga kerja pengangguran ataupun setengah penganggur Program ini diarahkan untuk

mencapai indikator persentase pencari kerja yang terdaftar, terlatih yang mendapatkan kesempatan kerja dengan target 75 %

c. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Kegiatan pada program ini terdiri 1). Operasional Pelayanan Perizinan yang memuat anggaran untuk pelaksanaan rapat-rapat dan survey dalam rangka penerbitan perizinan. 2). Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal yang memuat anggaran untuk pelaksanaan audit surveillance dan pelaksanaan evaluasi dan klarifikasi permasalahan penanaman modal dan perizinan. 3). Penyelenggaraan Pameran dan Investasi yang memuat anggaran untuk mengikuti pameran dalam negeri atau luar negeri, temu usaha dengan pelaku usaha perantauan, evaluasi Rencana Umum Penanaman Modal. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Realisasi Investasi (Rp. Milyar) dengan target 550 Milyar.

d. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Kegiatan pada program ini yaitu fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang memuat anggaran untuk sosialisasi pembentukan sarana hubungan industrial dan fasilitasi pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator persentase kasus sengketa tenaga kerja yang dituntaskan /diselesaikan dengan target 100 %

Guna tercapainya target indikator tersebut, terlampir Rencana Kerja Program dan Kegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatif tahun 2021 serta perkiraan maju tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 13) sebagaimana tabel 4.1.

Tabel 4.1

Rumusan Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan
Perkiraan Maju Tahun 2022
Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam

OPD : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		
	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJ AAN										
1	1	01			2.124.990.450				2,337,489,495		
1	1	01	20	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jangka waktu pelayanan jasa administrasi perkantoran	DPMPTP NAKER	12 bulan	474,990,450	APBD Kab. Agam	12 bulan	522,489,495
				Pengadaan ATK dan barang habis pakai			12 bulan	116,000,000		-	-
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			12 bulan	200,615,450		-	-
				Operasional pelayanan administrasi perkantoran			12 bulan	158,375,000		-	-
1	1	01	21	Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Jangka waktu pelayanan jasa administrasi perkantoran	DPMPTSP NAKER	12 bulan	625,000,000	APBD Kab. Agam	12 bulan	687,500,000
				Tersedianya pelayanan jasa perkantoran			12 bulan	330,000,000			
				Pemeliharaan gedung kantor			2 unit	25,000,000			
				Pemeliharaan peralatan kantor			53 Unit	25,000,000			
				Pelayanan Telekomunikasi, air dan listrik			12 bulan	170,000,000			
				Pemeliharaan kendaraan dinas			4 Unit	75,000,000			
1	1	01	22	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor	DPMPTSP NAKER	8 Unit, 5 Paket	1,025,000,000	APBD Kab. Agam	12 bulan	1,127,500,000
				Rehap berat Kantor dpmtsp			2 unit	250,000,000			
				Rehap berat bangunan workshop las dan lokomotif BLK, rumah untuk instruktur			3 unit bangunan	250,000,000			
				Pengadaan Laptop, Printer, Kursi rapat, Kursi eselon			2 unit laptop, 3 unit PC, 4 unit printer, 30 kursi rapat, 2 unit kursi	85,000,000			
				Pengadaan Mobil Dinas Kadis dan Sepeda Motor Dinas			1 unit mobil, 2 unit sepeda motor	440,000,000			

				Evaluasi dan klarifikasi laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dari pelaku usaha di Kab. Agam			75 Unit	36,000,000				
1	3	16	17	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah pameran investasi dalam negeri dan luar negeri yang diikuti	Dalam dan luar negeri	2 kali pameran	265,000,000	APBD Kab. Agam		2 kali pameran	291,500,000
				Pameran produk unggulan dan investasi			2 kali	150,000,000				
				Evaluasi dan review Rencana Umum Penanaman Modal			1 paket	40,000,000				
				Temu Usaha			135 orang	75,000,000				
1	4	17		Program : Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan			100%	60,000,000				66,000,000
1	4	17	03	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Jumlah kasus Perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dan dibina	Kab. Agam	40 kasus	60,000,000	APBD Kab. Agam		40 kasus	66,000,000
				Sosialisasi pembentukan sarana hubungan industrial			3 kali	45,000,000				
				Pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pengusaha dan pekerja			40 kasus	15,000,000				
				TOTAL				5.075.990.450	-	-	-	5,583,589,495

NB : (Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006)

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1447 Tahun 2019); program dan kegiatan sebagaimana tercantum pada Tabel 4.1 telah dikonversikan menjadi program dan kegiatan sebagaimana tabel 4.2

Tabel 4.2

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2021 dan prakiraan maju tahun 2022
Kabupaten Agam

OPD : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ (PERMENDAGRI 90/2009)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022											
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
2					URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8.128.737.393										9.348.048.001
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				2.445.000.000										2.811.750.000
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				50.000.000										57.500.000
2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)				50.000.000										57.500.000
2	07	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja daerah yang disusun	Kab. Agam, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	1 Dokumen	50.000.000	APBD			1 Dokumen						57.500.000
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				1.250.000.000										1.437.500.000
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi				1.250.000.000										1.437.500.000
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi di BLK jumlah peserta pemagangan BLK berprestasi jumlah peserta pembekalan magang ke jepang jumlah peserta sosialisasi dan seleksi peserta magang ke Jepang	Kab. Agam, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	240 orang 150 orang 80 orang 200 orang	1.250.000.000	APBD			240 orang 150 orang 80 orang 200 orang						1.437.500.000
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				1.085.000.000										1.247.750.000
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				1.085.000.000										1.247.750.000
2	07	4	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	jumlah pendataan dan pembinaan bursa tenaga kerja khusus jumlah peserta sosialisasi penempatan tenaga kerja	Kab. Agam, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	2800 orang 135 orang	55.000.000	APBD			2800 orang 135 orang						63.250.000
2	07	4	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumah Job fair yang dilaksanakan jumlah tenaga kerja mandiri yang diberdayaka jumlah tenaga kerja yang disalurkan melalui Program Padat Karya Infrastruktur	Kab. Agam, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	1 kali 200 orang 200 orang	1.030.000.000	APBD			1 kali 200 orang 200 orang						1.184.500.000
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				60.000.000										69.000.000
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				60.000.000										69.000.000
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kasus perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan jumlah sosialisasi dan perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pengusaha dan pekerja	Kab. Agam, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	40 kasus 3 kali	60.000.000	APBD			40 kasus 3 kali						69.000.000

2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				5.683.737.393				6.536.298.001
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				5.177.737.393				5.954.398.001
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan				3,696,711,043				4,251,217,699
2	18	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Frekuensi Pembayaran gaji, tunjangan dan TPP PNS	Kab. Agam, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	14 bulan	3,696,711,043	APBD		14 bulan	4,251,217,699
2	18	01	2.03		Administrasi Umum				1.481.026.350				1.703.180.302
	18	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja air Belanja listrik Belanja telepon	Kab. Agam, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	12 bulan 12 bulan 12 bulan	170,000,000	APBD		12 bulan 12 bulan 12 bulan	195,500,000
2	18	01	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah pembayaran premi asuransi kendaraan dinas	Kab. Agam, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	1 tahun	3,867,100	APBD		12 bulan	4,447,165
2	18	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	jumlah kendaraan dinas tahun 2009 yang diservis jumlah pajak kendaraan yang dibayarkan jumlah penggantian suku cadang kendaraan	Kab. Agam, Semua Kecamatan semua Kelurahan	1 unit 6 unit 1 unit	75,000,000	APBD		12 bulan	86,250,000
2	18	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jangka waktu pembayaran BPJS tenaga kontrak/ PTT Jangka waktu pembayaran honor pengelola keuangan Jangka waktu pembayaran honor PTT dan kontrak Jangka waktu pembayaran premi asuransi PTT Jangka waktu Pembayaran upah jangka terbatas waktu Jangka waktu Pembayaran upah pengemudi Jangka waktu Pembayaran upah petugas input aplikasi keuangan Jangka waktu pembayaran upah petugas kebersihan BLK Jangka waktu pembayaran upah petugas kebersihan dinas Jangka waktu pembayaran upah petugas keamanan/ satpam BLK Jangka waktu pembayaran upah petugas keamanan/ satpam dinas Jangka waktu pembayaran upah programer/ ahli jaringan Jumlah jam lembur non PNS Jumlah jam lembur PN	Kab. Agam, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	60 ob 10 bulan 14 bulan 60 ob 24 ob 264 oh 264 oh 24 ob 12 ob 24 ob 12 ob 12 ob 300 jam 395 jam	346,648,000	APBD		12 bulan	398,645,200

2	18	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pengadaan ATK	Kab. Agam, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	1 Paket	46,449,000	APBD		12 bulan	53,416,350
2	18	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah amplop, buku, kwitansi, map dan blanko yang dicetak jumlah baliho yang dicetak jumlah dokumen yang difotocopy jumlah dokumen yang dijilid jumlah perangko dan materai yang dibeli jumlah spanduk yang dicetak	Kab. Agam, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	7 jenis 5 buah 95600 lembar 325 lembar 500 lembar 10 buah	50,245,000	APBD		12 bulan	57,781,750
2	18	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik yang dibeli	Kab. Agam, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	9 jenis	6,035,000	APBD		12 bulan	6,940,250
2	18	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan laptop, PC, printer, kursi rapat dan kursi eselon jumlah pengadaan mobil dinas jumlah pengadaan sepeda motor jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang dibeli	Kab. Agam, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	5 paket 1 unit 2 unit 36 jenis	524,406,350	APBD		12 bulan	603,067,302
2	18	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah iklan pariwisata jumlah paket yang dikirimkan jumlah pengadaan bahan baku bangunan jumlah sarana mobilitas darat yang disewa	Kab. Agam, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	2 paket 150 paket 1 paket 1 unit	73,650,000	APBD		12 bulan	84,697,500
2	18	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah makan minum tamu yang disediakan jumlah makan minum lembur yang disediakan jumlah makan minum rapat yang disediakan	Kab. Agam, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	120 paket 200 paket 116 paket	10,190,000	APBD		12 bulan	11,718,500
2	18	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	Kab. Agam, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	3 jenis	266,500,000	APBD		12 bulan	306,475,000
2	18	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Kab. Agam, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	2 unit	25,000,000	APBD		12 bulan	28,750,000
2	18	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah AC yang diservice jumlah genset dan CCTV yang diservice jumlah komputer dan printer yang diservice jumlah laptop yang diservice jumlah mesin antrian, running text dan TV yang diservice	Kab. Agam, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	12 unit 2 unit 20 unit 6 unit 3 unit	25,000,000	APBD		12 bulan	28,750,000

2	18	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Rehab berat asrama BLK, bangunan las dan lokomotif BLK, rumah untuk instruktur rehab berat kantor DPMPPTSP Naker	Kab. Agam, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	1 paket	500,000,000	APBD		12 bulan	575,000,000
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				40,000,000				46,000,000
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				40,000,000				46,000,000
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	evaluasi dan review Rencana Umum Penanaman Modal	Kab. Agam, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	1 paket	40,000,000	APBD		75 persen	46,000,000
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				225,000,000				258,750,000
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				225,000,000				258,750,000
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah pameran produk unggulan dan investasi yang diikuti jumlah peserta yang mengikuti temu usaha	Kab. Agam, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	2 kali 135 orang	225,000,000	APBD		100 persen	258,750,000
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				175,000,000				201,250,000
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				175,000,000				201,250,000
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin yang dikeluarkan	Kab. Agam, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	5.300 izin	175,000,000	APBD		84 persen	201,250,000
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				66,000,000				75,900,000
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				66,000,000				75,900,000
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah audit/ surveylance yang dilaksanakan jumlah laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) yang dievaluasi dan klarifikasi	Kab. Agam, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	1 kali 75 dokumen	66,000,000	APBD		75 persen	75,900,000
J U M L A H									8.128.737.393				9.348.048.001

(Format Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019)

BAB IV

PENUTUP

Keberhasilan dalam mencapai Reencana Kerja Perangkat Daerah dapat ditentukan oleh Perencanaan yang matang dan Realistis sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Keuangan Daerah serta didukung oleh Sumber Daya Manusia yang handal dan Sarana dan Prasarana yang memadai.

Dalam Pelaksanaan suatu Program/Kegiatan perlu disusun Rencana Kerja dengan indikator yang jelas dan terukur. Kemudian untuk Kelancaran dan berdaya gunanya suatu Program/Kegiatan sangat diperlukan adanya pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dan petugas dibidang pengawasan, baik pengawas Struktural maupun pengawas Fungsional dan Masyarakat.

Disamping itu Komitmen dan dukungan dari seluruh Sumber Daya Manusia di lingkungan DPMPTSP NAKER Kab. Agam sangat diperlukan dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan- kegiatan tersebut dan guna terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak. Harapan kami semoga Renja Tahun 2021 ini dapat dipedomani dalam pelaksanaan program dan kegiatanyang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan *good governance* dan peningkatan realisasi investasi serta pengurangan angka pengangguran di Kabupaten Agam.

BUPATI AGAM,

INDRA CATRI

